



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR
273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN
TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN
ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

OKTA SOFIA RAHMI

11727201083

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

1442H/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Pelayanan trasi terpadu Kecamatan terhadap pemberian rekomendasi izin pemondokan atau Rumah kos dikecamatan Rumbai kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh :

Nama : OKTA SOFIA RAHMI

Nim : 11727201083

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 April 2021

Pembimbing Skripsi

PERI PIRMANSYAH, SH., MH.
NIK. 130217120

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **OKTA SOFIA RAHMI**

NIM : 11727201083

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada

Hari/Tanggal : Kamis 09 Juni 2021

Waktu : 08.00 Wib

Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Alpi Syahrin, SH.,MH

Penguji I

Dr. Abu Samah, MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Okta Sofia Rahmi, (2021) : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan Atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Salah satu wewenang camat dalam Keputusan Camat Rumbai Kota Pekanbaru Nomor: Kpts/23/KR/IX/2014 Perihal mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Rumbai adalah dalam hal pemberian rekomendasi izin pemandokan atau rumah kos.

Permasalahan ini timbul karena Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Rumbai dalam hal kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya dalam hal pengurusan izin rumah kos terbukti tidak adanya pengetahuan pemilik rumah kos tentang izin rumah kos, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya mengurus izin rumah kos karena mereka beranggapan pengurusan izin rumah kost berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya, Waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya dalam pemberian rekomendasi izin pemandokan/rumah kos dengan waktu tunggu pemohon dan proses penyelesaian masih terlalu lama selama 2 (dua) hari padahal dalam SOP di katakan hanya proses penyelesaian hanya 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja, dan juga Berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa masih adanya petugas/pegawai yang minta biaya dalam pengurusan rekomendasi izin pemandokan atau rumah kos kepada masyarakat, padahal biayanya gratis.

Hal ini dianggap penting karena usaha rumah kos dianggap menguntungkan terlebih jika berlokasi di daerah-daerah strategis di sekitar universitas sebagai pusat pendidikan. Namun hal ini tidak diiringi dengan kewajiban dari pemilik usaha untuk mengurus izin rumah kos sebagai suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai merupakan wilayah yang strategis bagi berdirinya beberapa perguruan tinggi saat ini, seperti Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Politeknik Caltex Riau (PCR), Fakultas Pejaskes Universitas Riau (UR) dan lain-lain. Dari hasil wawancara dan observasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos) belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keluhan dari masyarakat yang sedang mengurus surat rekomendasi izin pemandokan atau rumah kos

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelayanan kantor camat Rumbai yang masih kurang dari segi informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan juga mengenai waktu penyelesaian surat rekomendasi.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat bersta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatlan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Efendi dan Ibunda Siswarni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.
2. Kepada Suamiku tercinta yaitu Agusmanto yang telah berjuang bersamaku serta memotivasi lahir dan bathin dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a restu & ridha nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

5. Bapak Firdaus, SH, MH. selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

7. Bapak Budi Azwar, S.E..M.S.Ec selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

9. Kepada Ibu Camat Rumbai Kota Pekanbaru dan Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Ibu Lurah Rumbai Kota Pekanbaru dan Jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Ilham Syahputra, S.Ag, Desi Efrika Sari, A.md Keb, dan Arni Tri Sulastri selaku Saudara Kandung Penulis yang telah memberikan pengorbanan baik materi, tenaga , doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A dan team BeatSquad yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selama kuliah. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga Skripsi ini membari manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2021

OKTA SOFIA RAHMI

NIM. 1172720108



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rumbai	14
B. Kondisi Geografis Kecamatan Rumbai	15
C. Visi dan Misi Kantor Camat Rumbai.....	17
D. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rumbai	19
E. Kondisi Aparatur Kecamatan Rumbai	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perundang-Undangan	23
a. Pengertian Teori Perundang-Undangan	23
b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ..	24
c. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	27
B. Teori Pemerintah Daerah (PEMDA).....	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teori Mekanisme Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	33
a. Konsep Kebijakan	33
b. Konsep Evaluasi	35
c. Konsep Pelayanan	36
d. Konsep Pelayanan Publik	37
e. Konsep Kualitas Pelayanan	37
f. Konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemonudukan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru	42
B. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1	Peta Kecamatan Rumbai.....	16
Gambar 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rumbai	19
Gambar 2.3	Data Aparatur Kecamatan Rumbai Tahun 2020	30
Gambar 3.1	Perbedaan antara pelayanan Konvensional dengan paten	39



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar 1945 telah mengemankan bahwa Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan umum yang dilaksanakan aparatur pemerintahan dalam berbagai sector pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan hak-hak kebutuhan dasar masyarakat.¹

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, yang memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru Mengelurkan Peraturan yang Mengatur Hal ini, Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.²

Untuk mempercepat penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka untuk itu dikeluarkan pula Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Kota Pekanbaru tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan

¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 12.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi Terpadu Kecamatan bagi Objek dan Subjek Pelayanan sehingga dalam Melaksanakan Pelayanan dapat berjalan dengan Efektif, Efisien , dan Tepat Waktu. Melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, warga dapat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh kecamatan sendiri. Berdasarkan Keputusan Camat Rumbai Kota Pekanbaru Nomor: Kpts/23/KR/IX/2014, Perihal mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Rumbai. Maka untuk itu pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan ini harus sesuai dengan pelimpahan wewenang Walikota Pekanbaru kepada Camat.

Camat merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten, berada di wilayah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati sesuai dengan karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan terutama dalam pelayanan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur dalam Pasal 225 ayat (1) yaitu kecamatan dipimpin oleh camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menangani sebagian urusan otonomi daerah.³ Adapun kewenangan camat yang dilimpahkan diantaranya pada aspek rekomendasi (non perizinan) yang meliputi:

1. Pemberian rekomendasi izin gangguan (HO);
2. Pemberian rekomendasi pendirian tower;
3. Pemberian rekomendasi izin Pendirian Klinik;
4. Pemberian rekomendasi proposal;
5. Pemberian rekomendasi izin penelitian;
6. Pemberian rekomendasi izin pendaftaran lembaga swadaya masyarakat;
7. Pemberian rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos;
8. Pemberian rekomendasi izin pendirian sarana ibadah dan sosial;
9. Pemberian rekomendasi izin lokasi depot air minum isi ulang;
10. Pemberian rekomenadsi izin lokasi pengelolaan air bawah tanah.⁴

Dari berbagai jenis kewenangan yang menjadi wewenang camat, Penulis tertarik mengambil studi kasus adalah dalam hal pemberian rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos. Hal ini dianggap penting karena usaha rumah kos dianggap menguntungkan terlebih jika berlokasi di daerah-daerah strategis di sekitar universitas sebagai pusat pendidikan. Namun hal ini tidak diiringi dengan kewajiban dari pemilik usaha untuk mengurus izin rumah kos sebagai suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.

Pemondokan atau rumah kos adalah rumah yang penggunaannya sebagai sarana tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, dan pelajar atau masyarakat umum yang berasal dari berbagai daerah diluar Kota Pekanbaru yang pada

³ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 126 Ayat 1.

⁴ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal, 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan menerima penghuni pemondokan/rumah kos minimal 1 (satu) bulan atau lebih dengan memungut uang pemondokan. Untuk itu setiap orang atau badan yang memiliki usaha pemondokan/rumah kos yang berupa rumah atau kamar wajib memiliki surat izin pemondokan. Untuk Kecamatan Rumbai dari data yang didapatkan di setiap kantor Lurah jumlah rumah kos atau pemondokan terbanyak terdapat di Kelurahan Umban Sari yaitu 125 rumah kos atau pemondokan.

Selain itu Kecamatan Rumbai dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan juga mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas pada setiap jenis-jenis pelayanan yang diberikan, seperti pelayanan rekomendasi pemondokan atau rumah kos. Pemohon terlebih dahulu melengkapi semua persyaratan dan kemudian menyerahkannya kepada petugas meja/loket pelayanan. Untuk waktu penyelesaian dari surat rekomendasi pemondokan atau rumah kos ini adalah 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja dan tidak dikenakan biaya atau gratis. Berikut persyaratan yang harus dilengkapi pemohon:

1. Mengajukan permohonan izin pemondokan atau rumah kos;
2. Fotocopy KTP pemilik/pemohon;
3. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotocopy pelusan PBB terakhir;
5. Surat pernyataan persetujuan warga sekitar; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Rekomendasi RT, RW, dan Lurah.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah tertulis secara jelas standar prosedur pelayanan dikantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Namun, kenyataan di lapangan masih ditemukan fenomena-fenomena, yakni :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Rumbai dalam hal kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan khususnya dalam hal pengurusan izin rumah kos terbukti tidak adanya pengetahuan pemilik rumah kos tentang izin rumah kos.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya mengurus izin rumah kos karena mereka beranggapan pengurusan izin rumah kost berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya.
3. Waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan khususnya dalam pemberian rekomendasi izin pemondokan/rumah kos dengan waktu tunggu pemohon dan proses penyelesaian masih terlalu lama selama 2 (dua) hari padahal dalam SOP di katakan hanya proses penyelesaian hanya 60 (enam puluh) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja.
4. Berdasarkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa masih adanya petugas/pegawai yang minta biaya dalam pengurusan rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos kepada masyarakat, padahal biayanya gratis.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian

⁵ Keputusan Camat Rumbai Kota Pekanbaru Nomor: Kpts/23/KR/IX/2014, Perihal mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Rumbai.



Rekomendasi Izin Pemonudukan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Rekomendasi Izin Pemonudukan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 273 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemonudukan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan :
 - a. Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemonudukan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai Implementasi dan Faktor Penghambat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Dan juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah terkhusus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan bagi masyarakat yang memiliki Pemandokan atau Rumah kos agar mengetahui betapa pentingnya Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.



c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁶

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana

⁶ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁸ Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁹

Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif di dalam sistem perundang-undangan nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mana menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada, Dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan mengenai mekanisme Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini Di lakukan Di kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru terletak di Jalan Sri Indra Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai belum terlaksananya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahn

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 51.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

2017 tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Kota Pekanbaru

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹⁰ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Subjek Penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran, Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Camat atau Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Lurah Umban Sari atau Sekretaris Lurah Umban Sari, dan Masyarakat Yang Mengurus Izin.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.¹¹. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini ialah mekanisme Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau

¹⁰ https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 06 September 2020.

¹¹ *Ibid.*

tempat dengan ciri dan sifat yang sama.¹² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Camat atau Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Lurah Umban Sari atau Sekretaris Lurah Umban Sari.
- 2) Masyarakat Yang Mengurus Izin.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Camat /Sekretaris Camat	1	1	100%	Wawancara
2	Kasi Pemerintahan	1	1	100%	Wawancara
3	Lurah/Sekretaris Lurah Umban Sari	1	1	100%	Wawancara
4	Masyarakat yang Mengurus Izin	100 Orang	10 Orang	10%	Wawancara
Total Narasumber			13 Orang		

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

¹³ *Ibid*, hlm. 119.

5. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :¹⁴

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang berupa karya ilmiah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

¹⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Camat atau Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Lurah Umban Sari atau Sekretaris Lurah Umban Sari Dan Masyarakat Yang Mengurus Izin.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Wilayah Kecamatan Rumbai merupakan suatu wilayah Administrasi Kota Pekanbaru yang terletak di bagian Utara Kota dengan mengambil nama Rumbai sebagai nama Kecamatannya. Nama tersebut mengandung makna dan arti asal usul berdirinya dari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sampai menjadi Kecamatan Rumbai beberapa waktu lalu.

Dengan disempurnakannya pembagian Daerah Administratif dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tahun 1966 dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 20 September 1966 Nomor Kpts.151/IX/1966, dimana Kotamadya Pekanbaru dibagi dalam 6 (Enam) Wilayah kecamatan, yaitu :

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Rumbai.

Dengan adanya Kecamatan Rumbai ini, maka daerah Rumbai yang tadinya di luar Wilayah Kotamadya, dimasukkan menjadi Wilayah Kotamadya. Kecamatan Rumbai yang mempunyai luas wilayah 251,65 KM² (31.223 Hektare) yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kelurahan, yaitu :

Meranti Pandak, Umban Sari, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, Rumbai Bukit dan Muara Fajar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki serta Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 577 tentang Pemekaran Kelurahan Sekota Pekanbaru, Kecamatan Rumbai mengalami pengurangan jumlah Kelurahan. Luas Wilayah setelah pengurangan adalah sebesar 128,85 KM², terdiri dari 9 (Sembilan) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Rumbai Bukit dengan luas wilayah : 7000 KM².
2. Kelurahan Umban Sari dengan luas wilayah : 8,68 KM².
3. Kelurahan Sri Meranti dengan luas wilayah : 8,59 KM².
4. Kelurahan Palas dengan luas wilayah : 34,32KM².
5. Kelurahan Agro Wisata Luas wilayah : 7758 KM²
6. Kelurahan Maharani Luas wilayah : 7,5 KM²
7. Kelurahan Rantau panjang Luas wilayah : 10 KM²
8. Kelurahan Muara Fajar Barat Luas wilayah : 22.000 KM²
9. Kelurahan Muara Fajar Timur Luas wilayah : 25.000 KM²

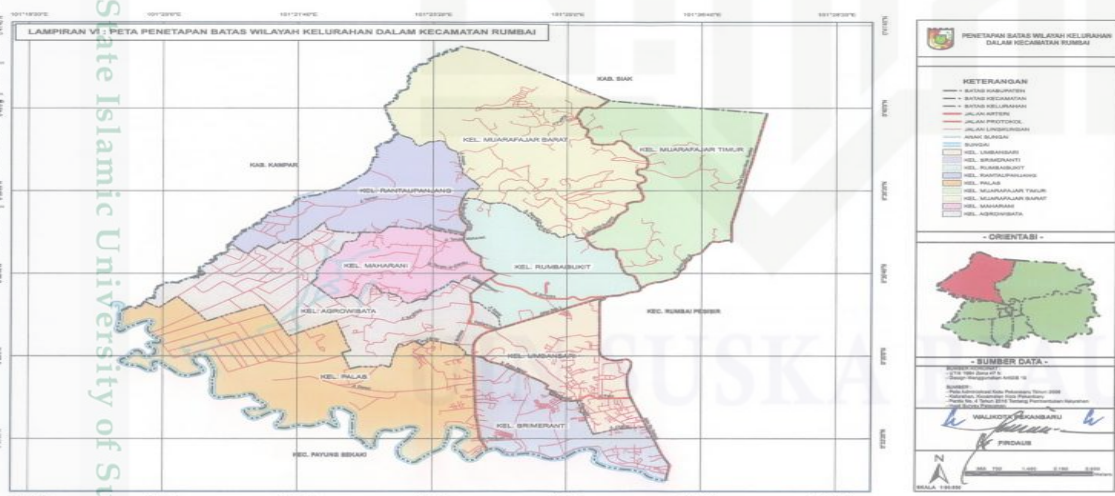
2. Kondisi Geografis Kecamatan Rumbai

Secara geografis Kecamatan Rumbai yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis karena berada di Pintu gerbang Kota Pekanbaru dari arah utara dan merupakan daratan yang mudah untuk dikembangkan. Dengan posisi yang demikian ini Kecamatan Rumbai sangat mudah dijangkau dari berbagai arah, Kecamatan Rumbai memiliki luas wilayah 160 Km² , terletak antara 0,54° - 0,67° lintang Selatan atau antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak Sri Indra pura;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Siak Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Senapelan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

PETA KECAMATAN RUMBAI





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Rumbai tanahnya relatif datar dan berbukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari Jenis tanah orgonosol dan glei hulus bahan induk aluvial, podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan batuan beku serta jenis tanah podsolik merah kuning kompleks dengan bahan induk bahan batuan endapan.

Arah pengembangan Struktur ruang Kecamatan Rumbai menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru 2013-2033 mengisyaratkan bahwa Kecamatan Rumbai akan dijadikan sebagai Kawasan Agro Wisata dan Ruang Terbuka Hijau. Untuk menunjang hal tersebut sudah mulai dilaksanakan beberapa tahapan pembangunan seperti :

1. Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Luar di Kelurahan Muara Fajar, Palas dan Rumbai Bukit.
2. Pelebaran Jl. Yos sudarso
3. Rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Dumai

Kecamatan Rumbai memiliki Potensi lahan yang cukup luas, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Dengan kondisi lahan yang masih luas dan banyak tidak dimanfaatkan menimbulkan banyak terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.

3. Visi Dan Misi Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru

a. Visi Kecamatan Rumbai

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mempunyai visi yaitu *“Unggul dalam pelayanan publik dengan SDM aparatur yang handal”*.

Pernyataan visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pelayanan publik menggambarkan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau.
2. Unggul menggambarkan tertib dan tersusunnya administrasi kantor dengan baik sesuai dengan tupoksi masing masing seksi.
3. SDM aparatur yang handal menggambarkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tupoksi sesuai bidang tugasnya, punya daya saing serta mampu memberdayakan masyarakat.

b. Misi Kecamatan Rumbai

Dalam mewujudkan Visi Kecamatan Rumbai diperlukan perumusan bagaimana usaha mencapainya. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun Misi Kecamatan Rumbai, adalah :

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dan perhatian terhadap masyarakat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Handal dan berwibawa

3. Membangkitkan minat masyarakat untuk berbudaya Melayu yang bermartabat dan bermarwah serta memiliki rasa kebangsaan
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Rumbai

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dapat dicapai.

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rumbai

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Unggul dalam pelayanan publik dengan SDM aparatur yang handal	Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dan perhatian terhadap masyarakat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintah
				Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan asset



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Tersedianya dokumen Potensi PAD Persampahan dan Profil Kecamatan serta Kelurahan
	Meningkatkan SDM Aparatur yang Handal dan berwibawa	Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi	Kinerja aparatur yang telah sesuai dengan tupoksi	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang handal
	Membangkitkan minat masyarakat untuk berbudaya Melayu yang bermartabat dan bermarwah serta memiliki rasa kebangsaan	Mewujudkan masyarakat berbudaya Melayu yang madani	Meningkatnya kecintaan masyarakat akan kebudayaan melayu	Peningkatan kecintaan masyarakat terhadap budaya melayu
			Mewujudkan masyarakat yang madani	Pembinaan Syiar keagamaan
	Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran aktif dan kontrol dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat	Terwujudnya program dan kegiatan yang berasal dari atau dan Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan masyarakat	Persentase kehadiran masyarakat dan Persentase partisipasi perempuan (kader) dalam pembangunan



5. Kondisi Aparatur Kecamatan Rumbai

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah kelurahan/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya.¹⁷

Tabel 2.3

Data Aparatur Kecamatan Rumbai Tahun 2020

NO	N A M A	Pangkat /Golongan	JABATAN
1	VEMI HERLIZA, S.STP	Penata Tk I / (III/d)	Camat
2	RAISAH VINORA PUTRI, S.STP	Penata / (III /c)	Sekretaris Camat
3	INDRA GAFUR, S.Sos, M.Si	Penata / (III/c)	Kasi Pemerintahan
4	GUSTI HENNI PURWANTI, SS	Penata Tk I / (III/d)	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

¹⁷ Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	ABDUL AZIS	Penata / (III/c)	Kasi Pelayanan Terpadu
6	FAJRINA, S.IP	Penata Tk I / (III/d)	Kasi Kesejahteraan Sosial
7	SARDEF SAPUTRA, SP	Penata / (III/c)	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
8	SYAHRIZAL PAHLEPI YAS, S.Sos	Penata / (III/c)	Kepala Sub Bagian Keuangan
9	SEPTRI MURNI, S.Pd	Penata Muda / (III/a)	Staf
10	ANDRIANUS MANIK, A.Md	Penata Muda/ (III/a)	Staf
11	WAN RAHMAT	Pengatur / (II/c)	Staf
12	TAMSUL, S.I Kom	Penata Muda/ (III/a)	Bendahara

Sumber : Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Teori Perundang-Undangan

1. Pengertian Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁸

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.¹⁹

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,

¹⁸ Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm.18.

¹⁹ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.19.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.²⁰

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:

Pertama, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.”

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:

- a. adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan

²⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat).

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas lex superiori derogate lex inferioriialah adalah sebagai berikut :

- a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
- c) perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.²¹

²¹ Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm.62.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang-undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.²²

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. dapat dikedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan;
- g. dan keterbukaan.

²² Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, hlm. 78-79.

3. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dasar hukum peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Rechts* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²³

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga

²³ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, hlm.35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu Norma Dasar tersebut dikatakan pre-supposed. Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- a. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
- b. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara);
- c. Formell Gesetz (Undang-undang „formal“);
- d. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana & aturan otonom).²⁴

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm. 36-40.

²⁵ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, hlm.171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevoegd) atau melampaui wewenang (deternement de pouvoir).
 - c. Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.²⁶

B. Teori Pemerintah Daerah (PEMDA)

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat, Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Local government merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan

²⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, hlm.27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam system unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibu Kota. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat local. Inilah yang menginginkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.²⁷

Wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pasca era reformasi di Indonesia, salah satunya diimplementasikan melalui pemberian otonomi ke masyarakat sejak 1999. Agenda otonomi daerah memasuki babak baru sejalan

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pesan perubahan penting yang dibawa UU tersebut adalah memberikan otonomi ke daerah otonom kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecuali enam urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.²⁸ Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi. Desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.

Adapun tujuan dari adanya otonomi daerah berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.²⁹

²⁸ Ibid, hlm. 60.

²⁹ H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 61.



Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Teori Mekanisme Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

a. Konsep Kebijakan

Parsons memberikan gagasan tentang kebijakan yaitu seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Berikutnya Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.³⁰

Dari pengertian tersebut kebijakan dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun perlu dipahami secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan

³⁰ Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugraha menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu
 - (a). UUD 1945,
 - (b). UU/Perpu,
 - (c). Peraturan Pemerintah,
 - (d). Peraturan Presiden, dan
 - (e). Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

1. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Outputs (hasil). Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
4. Outcomes (dampak). Yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Dalam buku Ndraha Mengatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya yaitu sebagai berikut :

1. Model before-after yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) Tolak ukurnya adalah before.
2. Model das solen-das yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok control kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok control.

Berbicara tentang Evaluasi pasti yang terlintas dipikiran kita adalah penilaian atau perbandingan hasil kenyataan dengan yang diharapkan selain itu keberadaan Evaluasi di gunakan sebagai sejauh mana keberhasilan suatu program sedangkan Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Konsep Pelayanan

Gronross memberikan definisi tentang konsep pelayanan yaitu suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Lovelock juga memberikan pengertian konsep pelayanan yaitu produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan langsung.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan atau petugas) dan peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara pelayanan.

Menurut Ndraha pelayanan terdiri dari jasa publik (public service) dan layanan civil (civil service). Lebih lanjut ia menjelaskan perbedaannya. Layanan civil (civil service) berbeda dengan jasa publik (public service). Layanan civil tidak dijual beli, dimonopoli oleh badan-badan publik (pemerintah, negara), dan tidak boleh diprivatisasikan (diswastakan), sedangkan jasa publik dijual beli, di bawah kontrol legislatif³¹.

³¹ Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.



d. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hardiyansyah mengatakan setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

e. Konsep Kualitas Pelayanan

Secara harafiah Kualitas Pelayanan terdiri dari dua buah kata, yakni Kualitas dan Pelayanan. Kualitas berasal dari kata quality yang berarti mutu. konsep kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan tersebut.

Sedangkan menurut Agus Dwiyanto berpendapat ada 5 dimensi dari kualitas pelayanan, adapun dimensi tersebut adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sikap petugas, dapat dilihat dari keramahan dan ketanggapan petugas dalam melayani dan perlakuan adil oleh petugas
- b. Prosedur, kemudahan masyarakat mendapatkan informasi mengenai prosedur dan kesesuaian prosedur pelayanan dengan standar minimal.
- c. Waktu, ketetapan waktu pelayanan dan ketetapan waktu penyelesaian, ketetapan waktu jam kerja.
- d. Fasilitas, ruang tunggu yang nyaman, fasilitas pendukung yang disediakan untuk masyarakat, fasilitas untuk petugas.
- e. Biaya pelayanan, informasi biaya dan kesesuaian biaya.³²

f. Konsep Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dalam Pasal 1 ayat (3) memberikan definisikan bahwa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau disingkat Paten dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan hingga penerbitan dokumen, dilakukan melalui suatu meja atau loket pelayanan. Sistem ini warga hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan.

³² Muhdad dkk. 2008. *Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan*. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta. Hlm. 104-123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisikan PATEN juga di sampaikan Maulidiah yaitu sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahapan permohonan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, hingga pada tahap penerbitan dokumen, dan dilakukan sluruhnya melalui satu meja atau loket pelayanan publik sebagai upaya untuk mewujudkan efesisensi dan efektifitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik menjadi sorotan utama oleh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik selama ini di Indonesia.

Sebelum adanya PATEN pelayanan yang ada di kecamatan selama ini dilakukan secara konvensional oleh masyarakat dengan mendatangi setiap petugas yang berkepentingan, seperti kepala seksi bersangkutan, sekcama dan camat. Namun dengan adanya PATEN warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja/loket pelayanan saja, sambil duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Tabel 3.1
Perbedaan antara pelayanan Konvensional dengan PATEN
sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perbedaan Pelayanan Konvensional dan PATEN Aspek Perbedaan	Pelayanan Konvensional	Pelayanan Paten
Fisik	Terdiri dari beberapa meja yang saling terpisah	Loket/meja yang difungsikan khusus untuk pelayanan yang terdiri dari dua bagian yang berhubungan langsung dengan warga, yaitu (a) Bagian penerimaan berkas; dan (b) Bagian penyerahan dokumen hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Proses	<p>a. Warga membawa berkas persyaratan dan menemui secara langsung pejabat yang berhubungan dengan urusannya, yaitu Kepala Seksi, Sekcam dan Camat;</p> <p>b. Bila pejabat tersebut tidak hadir, warga harus kembali lagi pada lain hari;</p> <p>c. Bila tidak tahu proses pengurusannya, warga harus bertanya kesana kemari, sehingga memperlambat penyelesaian pelayanan.</p>	<p>a. Warga cukup menyerahkan berkas persyaratan melalui loket/meja pelayanan, menunggu di ruang tunggu dan menerima dokumen hasil;</p> <p>b. Ada pendelegasian kewenangan, sehingga ketidakhadiran seorang pejabat dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk;</p> <p>c. Alur prosesnya ditampilkan secara jelas dan transparan.</p>
Sumber Daya Manusia	Tidak ada pembagian tugas dalam memberikan pelayanan, sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai dan cenderung tidak efisien	<p>a. Ada petugas khusus yang melayani warga;</p> <p>b. Setiap pegawai memiliki peran yang jelas dalam melayani warga;</p>
Ketersediaan Informasi	<p>a. Tidak ada informasi mengenai persyaratan, biaya dan waktu, sehingga warga cenderung mengeluarkan biaya lebih besar dengan harapan cepat selesai;</p> <p>b. Informasi biasanya</p>	<p>a. Tersedia informasi mengenai jenis pelayanan, waktu, biaya dan prosedur untuk memperoleh pelayanan;</p> <p>b. Ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>disampaikan langsung oleh pegawai kecamatan kepada warga yang sedang mengurus pelayanan;</p> <p>c. Camat sulit mengontrol biaya pelayanan yang diterima pegawainya;</p> <p>d. Dapat menjebak Camat dengan tuduhan “kutipan liar”.</p>	<p>c. Penerimaan biaya pelayanan dapat dipantau secara langsung, karena pembayaran dicatat secara transparan dan akuntabel;</p> <p>d. Memberikan kepastian kepada Camat dalam menjalankan pelayanan publik.</p>
Partisipasi warga	<p>a. Tidak ada partisipasi warga;</p> <p>b. Warga hanya menerima proses pelayanan publik apa adanya.</p>	<p>a. Warga dapat mengakses informasi pelayanan, sehingga lebih mudah memberikan masukan untuk perbaikan;</p> <p>b. Warga dapat menyampaikan pengaduan bila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.</p>

Sumber: AIPRD LOGICA, diolah dari berbagai sumber oleh Muhdad dkk, 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru

Kecamatan dapat menyelenggarakan PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis. Bila ketiga syarat itu dipenuhi, maka kecamatan itu dapat menyelenggara PATEN, diantaranya :

- a. Persyaratan Substantif
- b. Persyaratan Administratif
- c. Persyaratan Teknis

Pejabat Penyelenggara Paten diantaranya :

- a. Camat penanggung jawab atas penyelenggara PATEN,
- b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN dan pelaksanaan tugasnya Sekretraiat,
- c. Kepala Seksi yang yang membidangi pelayanan administrasi memiliki tugas melaksanakan teknis pelayanan PATEN.



2. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 273 Tahun 2017 Tentang Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ini ada beberapa indikator yang menjadi penghambat yang akan penulis uraikan sebagaimana dibawah ini :

- a. Kelengkapan Persyaratan
- b. Prosedur Pelayanan
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya Pelayanan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos) belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keluhan dari masyarakat yang sedang mengurus surat rekomendasi izin pemandokan atau rumah kos tentang pelayanan kantor camat Rumbai yang masih kurang dari segi informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan juga mengenai waktu penyelesaian surat rekomendasi.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara ke berbagai informen maka ditemukan kendala-kendala dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos) yakni :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pertama, Tidak adanya papan informasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengurusan surat rekomendasi.

Kedua, Pelayanan pengurusan surat rekomendasi izin pemondokan atau rumah kos kadang-kadang memerlukan waktu yang lama karena Camat yang menandatangani surat rekomendasi tersebut tidak berada ditempat sedangkan tidak ada kebijakan untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Sekretaris Camat.

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Paten, padahal ini adalah sesuatu yang diharuskan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemondokan atau Rumah Kos) yakni :

1. Sebaiknya PEMDA Mengeluarkan Dana atau membuat Anggaran Untuk petugas Kecamatan, Agar dapat melakukan Survey kepada masyarakat yang tidak memiliki Rekomendasi izin Pemondokan atau Rumah kos.
2. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mencari informasi mengenai biaya, waktu prosedur serta persyaratan pelayanan, agar tidak ada celah bagi oknum petugas pelayanan untuk memungut biaya yang tidak resmi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintah dalam hal ini Camat Rumbai harus membuat suatu kebijakan mengenai pelimpahan kewenangan dalam menandatangani surat rekomendasi izin kepada Sekretaris Camat agar pelayanan tidak terhambat.
4. Adanya tindakan tegas dari Pihak yang berwenang kepada masyarakat yang tidak mengurus Paten dalam hal apapun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa itu paten? Bagaimana pandangan narasumber akan implementasi paten di tengah-tengah masyarakat ?
2. Bagaimana kendala paten dalam administrasi di kantor camat rumbai ?
Apakah sop paten ?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam administrasi pelaksanaan paten di kantor camat ?

WAWANCARA DENGAN CAMAT RUMBAL



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

WAWANCARA DENGAN KASI PEMERINTAHAN RUMBAL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN LURAH UMBAN SARI KECAMATAN RUMBAI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA DENGAN PEMILIK KOS-KOSAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh :

Nama : **OKTA SOFIA RAHMI**

NIM : 11727201083

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada

Hari/Tanggal : Kamis 09 Juni 2021

Waktu : 08.00 Wib

Tempat : Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Alpi Syahrin, SH.,MH

Penguji I

Dr. Abu Samah, MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui :

Kasubag Akademik

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jaknus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU “, ditulis oleh saudara:

Nama : Okta Sofia Rahmi

NIM : 11727201083

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 24 November 2020

Narasumber : Ilham Akbar, SH, MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 03 Desember 2020
Narasumber

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Ilham Akbar, SH, MH
NIP. 130217040

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/6990/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OKTA SOFIA RAHMI
NIM : 11727201083
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 273 tahun 2017 tentang sistem
pelayanan administrasi terpadu kecamatan terhadap pemberian rekomendasi izin
pemondokan atau rumah kos di kecamatan rumbai kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hal ini merupakan dokumen milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38197
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6990/2020 Tanggal 7 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

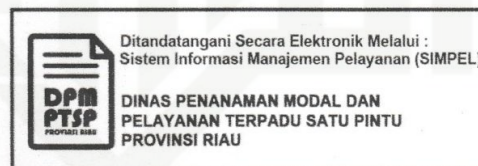
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | OKTA SOFIA RAHMI |
| 2. NIM / KTP | : | 11727201083 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR CAMAT RUMBAI KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/252



a. Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

- : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38197 tanggal 29 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : OKTA SOFIA RAHMI
2. NIM : 117201083
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. PEMBINA IV BLOK O NO. 006 KEL. LEMBAH SARI KEC. RUMBAI PESISIR-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2734 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yana Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Dasar

b. Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yana Bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN RUMBAI BARAT
JALAN TENGKU KASIM PERKASA RUMBAI BARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/KRB/2021/.93

CAMAT RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : OKTA SOFIA RAHMI
No. Mhs : 117201083
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau/ Ilmu Hukum
Alamat : Pekanbaru

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian pada Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

Surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan mengikuti ujian skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2734 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU"** pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

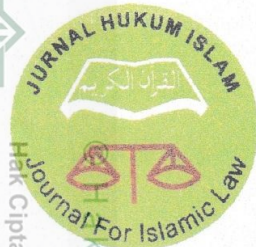
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Pekanbaru, 23 April 2021

a.n CAMAT RUMBAI BARAT
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat



GUSTI HENNI PURWANTI, S.S
NIP. 19710815 200502 2 007



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : OKTA SOFIA RAHMI
NIM : 11727201083
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR 273 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PELAYANAN
 ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TERHADAP
 PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN PEMONDOKAN ATAU
 RUMAH KOS DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

Pembimbing: Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

M. Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : OKTA SOFIA RAHMI
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru/ 04 Oktober 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jln. Pembina IV Perumahan Graha
 Tanjung Indah Blok O No. 006 , Kec.
 Rumbai Pesisir,Pekanbaru.
 No. Telp/Hp : 082278701417
 Nama Orang Tua : Efendi (Ayah)
 Siswarni (Ibu)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 026 Rumbai Pesisir (Pekanbaru) : Lulusan Tahun 2010
- Ma'had Daarun Nahdhah (Bangkinang) : Lulusan Tahun 2014
- Ma'had Daarun Nahdhah (Bangkinang) : Lulusan Tahun 2017
- UIN SUSKA Riau : Lulusan Tahun 2021

ORGANISASI

- 2018-2021 : Bergabung di Lembaga Pembelajaran Bimbingan Privat SD-SMA Lembaga "ADHA PRIVAT".
- 2016-2021 : Bergabung di MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) Kota Pekanbaru.
- 2016-2021 : Bergabung di LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Muara Fajar, Rumbai timur, Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.